



IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM KERANGKA REALISASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DI KECAMATAN PULAU-PULAU BATU KABUPATEN NIAS SELATAN

Arifin Sihombing¹, Dedi Iswandi²
Universitas Darma Agung Medan^{1,2}
Corresponding Email : sihombing.arifin@gmail.com

ABSTRAK

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Menuntaskan kemiskinan masyarakat bukan suatu hal yang mudah, kemiskinan tidak akan berubah secara signifikan jika pemerintah atau para pemegang kekuasaan/jabatan tidak melakukan hal yang mendasar. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Untuk menjawab masalah tersebut maka peneliti mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan. Yang menjadi informan dalam Penelitian ini adalah berjumlah 10 orang yang masing-masing terdiri dari Camat Pulau-Pulau Batu 1 orang, Ketua PNPM-MP Kecamatan Pulau-Pulau Batu 1 orang, Kepala Desa Kecamatan Pulau-Pulau Batu 1 orang, Sekretaris Desa Kecamatan Pulau-Pulau Batu 1 orang dan Masyarakat Desa Kecamatan Pulau-Pulau Batu 6 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan analisis kualitatif adalah analisa terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta dan data informasi dan Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dan Studi dokumentasi dengan mengadakan pengamatan/penelitian langsung pada objek atau lokasi penelitian, baik melalui wawancara maupun dengan Observasi.

Dari hasil penelitian diketahui Implementasi program penanggulangan kemiskinan dalam kerangka realisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan pulau-pulau Batu Kabupaten Nias Selatan masih belum terlaksana dengan baik sehingga banyak masyarakat tidak semua mengetahui tentang program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan tersebut dan perlu adanya evaluasi yang significant dalam menindaklanjuti program PNPM-MP dalam program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Pulau-Pulau Batu.

Kata Kunci : Implementasi, Kemiskinan, PNPM Mandiri Perdesaan

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara besar dalam banyak hal seperti memiliki luas wilayah, jumlah penduduk, sumber daya alam, dan Indonesia juga termasuk Negara yang penduduknya

tergolong miskin. Kemiskinan merupakan suatu masalah fenomenal sepanjang sejarah Negara Indonesia sebagai suatu Negara kesatuan.

Tujuan negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan kalau kemiskinan dapat dikurangi, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan umum dapat dilakukan melalui upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009, target penurunan kemiskinan pada tahun 2009 ditetapkan sebesar 8,2 % dari total jumlah penduduk Indonesia. Sejalan dengan itulah salah satu program prioritas Kabinet Indonesia Bersatu adalah penghapusan kemiskinan.

Dengan persoalan kemiskinan ini yang telah menyebabkan jutaan anak-anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan dalam membiayai kesehatan, kurangnya pemerintah memberikan perhatian khusus kepada masyarakat miskin, semakin meningkatnya jumlah pengangguran yang disebabkan karena lapangan pekerjaan semakin minim dan jumlah pertumbuhan penduduk semakin meningkat, serta kurangnya jaminan sosial oleh pemerintah terhadap perlindungan masyarakat miskin yang menyebabkan jutaan rakyat yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan secara terbatas.

Adapun strategi percepatan penanggulangan kemiskinan seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 3 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagai berikut:

- 1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- 2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- 3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- 4) Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan di Indonesia, sesungguhnya merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu terciptanya kesejahteraan serta kemandirian masyarakat yang berkelanjutan yang adil dan makmur, Sebagai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 Ayat (4) “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” dan dipertegas pada Pasal 34 Ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Amandemen IV).” Ini berarti, kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan *platform system* perekonomian dan *system* kesejahteraan sosial di Indonesia.

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial masyarakat sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsep pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari suatu kegiatan pembangunan dan menuntaskan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Adapun kesejahteraan masyarakat mempunyai lima fungsi pokok yaitu:

- 1) Perbaikan secara progresif dari pada kondisi-kondisi kehidupan orang



- 2) Pengembangan sumberdaya manusia
- 3) Berorientasi orang terhadap perubahan sosial dan penyesuaian diri
- 4) Penggerakan dan penciptaan sumber-sumber komunitas untuk tujuan-tujuan pembangunan.
- 5) Penyediaan struktur-struktur institusional untuk berfungsinya pelayanan-pelayanan yang terorganisir lain

Menuntaskan kemiskinan masyarakat bukan suatu hal yang mudah, kemiskinan tidak akan berubah secara signifikan jika pemerintah atau para pemegang kekuasaan/jabatan tidak melakukan hal yang mendasar. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri Perdesaan diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal .

Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat diwujudkan. “Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM Mandiri Perdesaan akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015.

Kini, pemerintah pusat mengeluarkan program baru yang sasarannya bukan untuk masyarakat secara individu, tetapi membangun infrastruktur umum untuk menanggulangi kemiskinan sekaligus pemberdayaan semua masyarakat terutama masyarakat miskin sehingga diharapkan dapat membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat.



Program ini dikemas lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Implementasi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui PNPM-MP di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan ini merupakan pusat pengembangan kreatifitas masyarakat menuju ekonomi kreatif, realisasi kegiatan PNPM-MP dimulai dengan MCK (Mandi Cuci Kalkus), SPP (Simpan Pinjam Perempuan), Kursus Menjahit dan Menganyam Tikar.

Kecamatan Pulau – Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan Memiliki Jumlah Penduduk yaitu 8.513 Jiwa, merupakan salah satu kecamatan yang tertinggal didalam pelaksanaan Penyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dalam hal ini Program Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan. ini dibuktikan dengan masih belum optimalnya pelaksanaan Penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh PNPM Mandiri Perdesaan disebabkan karena faktor sumber daya manusia yang belum terampil, dan terdidik secara memadai. Dan juga sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sangat terbatas. Oleh karena itu dibutuhkan sosialisasi secara berkelanjutan dan memberikan pelatihan kepada masyarakat secara berkala.

Masyarakat di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan terdiri dari berbagai agama, adat, pekerjaan serta budaya yang berbeda yang artinya masyarakat di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan memiliki keanekaragaman masyarakat walaupun memiliki suku yang sama. Dengan melihat keadaan masyarakat tersebut seharusnya pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan merata, namun pada kenyataan di lapangan tidak terealisasi ini terbukti angka kemiskinan pada Tahun 2014 di Kecamatan Pulau– Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan mencapai 363 kk (22,6%) data ini terlihat dari banyaknya pengangguran, rumah tidak layak huni (gubuk) dan keterbelakangan pengetahuan dan masyarakat disana rata-rata mata pencahariannya mulai dari nelayan, buruh dan petani dan pendapatan mereka setiap harinya tidak menetap terkadang sedang dan terkadang juga rendah

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian atau responden dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, interview (wawancara) dan studi dokumentasi. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu : (1) data primer berupa rekaman atau video dan juga catat-mencatat saat wawancara akan dimulai. Dan (2) data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Langkah analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu: mengelompokkan, memilih dan memilah data, lalu kemudian menganalisisnya. Analisa data ini berupa narasi dari rangkaian hasil penelitian yang muaranya untuk menjawab rumusan masalah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lingkaran Setan Kemiskinan dalam Kehidupan Masyarakat Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan.

Lingkaran setan kemiskinan, pada hakikatnya bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan masa lalu tetapi juga disebabkan oleh hambatan pembangunan di masa



yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini Nurkse mengatakan: “Suatu negara menjadi miskin karena ia merupakan negara miskin(A country is poor because it is poor)”. Menurut pendapatnya, inti dari lingkaran setan kemiskinan adalah keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap terciptanya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Di satu pihak pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan, dan di lain pihak oleh perangsang untuk menanam modal.

Dari lingkaran setan kemiskinan dapat diketahui bahwa aspek-aspek yang menciptakan tingkat kemiskinan semakin tinggi disebabkan oleh keterbelakangan pengetahuan dari masyarakat dan ketertinggalan informasi sehingga membuat masyarakat hanya bergantung pada penghasilan sehari-hari. Dari hal ini menggambarkan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah akan karena tingkat produktifitas yang rendah sehingga menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung sangat rendah.

Masyarakat Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan, mempunyai mata pencaharian mulai dari nelayan, buruh, petani, pengusaha dan lain-lain. Sumber pencaharian masyarakat tersebut hanya dapat memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Hal ini menyebabkan kurangnya produktifitas dan akhirnya membuat masyarakat itu sendiri kurang menabung. Keterbelakangan pengetahuan juga membuat masyarakat Kecamatan Pulau-Pulau Batu kurang produktif dalam hal mengolah bahan baku yang ada di lingkungan sekitarnya.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hayudin Zamili, SPd., Wawancara dilaksanakan pada hari Jumat 11 April 2014 sebagai camat di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan. Beliau Menyampaikan bahwa :

“Masyarakat Pulau-Pulau Batu memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Sebenarnya dengan hasil laut yang melimpah, hasil kebun karet, dan lain sebagainya, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hanya saja keterbelakangan pengetahuan daripada masyarakat sendiri untuk memproduksi bahan baku yang ada masih kurang sehingga masyarakat hanya bersandar pada penghasilan saat itu juga”.

Gambaran keadaan masyarakat Kecamatan Pulau-Pulau Batu yang kurang produktif juga dipaparkan oleh Bapak Dedy Daya., Wawancara dilaksanakan pada Hari Selasa 13 April 2014 sebagai ketua PNPM-MP. Beliau menyampaikan bahwa:

“Sebelum adanya program PNPM-MP sebagai penanggulangan kemiskinan di kecamatan ini, masyarakat masih minim pengetahuan dalam hal memproduksi bahan baku yang ada di lingkungan sekitar. Keterbatasan tersebut menyebabkan masyarakat pedesaan minim kreatif sehingga kelangsungan kehidupan masyarakat hanya berharap pada pendapatan kepala rumah tangga. Dengan alam yang kaya, sebenarnya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin”.

Keterbelakangan kehidupan masyarakat di Kecamatan Pulau-Pulau Batu menjadi sebuah perhatian besar bagi masyarakat itu sendiri seperti halnya yang disampaikan Bapak Hakim Manao., Wawancara dilaksanakan pada hari Senin 21 April 2014 sebagai masyarakat Kecamatan Pulau-Pulau Batu beliau menyampaikan bahwa:

“Tingkat produktifitas masyarakat sangat rendah. Ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengolah bahan baku yang sudah ada. Dan kami



juga (masyarakat) ingin berbuat sesuatu tapi apa mau dikata pengetahuan kami hanya sebatas mencari nafkah. Seandainya ada bimbingan dari pihak yang memiliki pengetahuan banyak, pasti kami ingin bisa beranjak dari keterpurukkan kami”.

Lingkaran setan kemiskinan dalam kehidupan masyarakat kecamatan Pulau-Pulau Batu telah merambat sangat pesat. Pernyataan dari ketiga informan di atas, masing-masing menggambarkan kurangnya pendapatan masyarakat yang mengakibatkan kurangnya produktifitas. Semua ini dikarenakan ketertinggalan, keterbelakangan, kekurangan modal, sehingga pendapatan masyarakat setiap harinya tidak dapat ditabung dan hal ini menyebabkan kurangnya produktifitas atau kreativitas masyarakat yang bernilai ekonomi mandiri.

Dari uraian diatas dapat kita ketahui penyebab kemiskinan di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias adalah: Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kemudian diikuti oleh akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah dan terakhir kemiskinan muncul disebabkan perbedaan akses dan modal.

Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2006:65).

Proses implementasi mengarah kepada kebijakan yang merupakan tujuan sasaran yang akan diterapkan kepada masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, berdampak pada kehidupan yang akan datang. Kebijakan yang diterapkan harus mengena kepada sasaran sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

Pemerintah merupakan implementer dari pada kebijakan. Setiap kebijakan yang ditetapkan harus memikirkan dampak yang akan terealisasi kepada masyarakat. Dalam hal ini dampak yang akan terjadi berupa dampak langsung, dampak jangka menengah dan dampak jangka panjang yang akhirnya akan mengarah kepada akhir daripada kinerja implementasi (Ripley yang dikutip dalam Islamy, 1985/1997).

Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan telah merealisasikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP). Hal ini merupakan pusat pengembangan kreatifitas masyarakat menuju ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif dapat mengembangkan taraf kehidupan masyarakat dan menjauhkan masyarakat tersebut dari lingkaran setan kemiskinan.

Implementasi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui PNPM-MP di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan telah terlaksana sesuai dengan kaidah yang berlaku seperti yang disampaikan oleh Bapak Hayudin, Zamili Sebagai Camat Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan :



“Sesuai dengan aturan yang ada dan para pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di tingkat Kecamatan dan Desa sampai sekarang ini terlaksana dengan baik”.

Dari gagasan yang disampaikan beliau menggambarkan relisasi kegiatan PNPM-MP di kecamatan pulau-pulau batu dari paparan beliau menyatakan:

“Hal ini bisa kita ketahui dari terlaksananya program MCK (Mandi Cuci Kakus), Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Kursus Menjahit dan Menganyam Tikar (Kegiatan Ibu Rumah Tangga)”.

Implementasi Kebijakan pemerintah melalui PNPM-MP telah terlaksana. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan seperti yang tidak. Terlaksananya PNPM-MP hanyalah sebatas kegiatan formalitas seperti yang disampaikan Bapak Ediriman Duha., Wawancara dilaksanakan pada hari Selasa 24 April 2014 sebagai masyarakat Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan. Beliau menyatakan:

“Terlaksana ya telaksanan tapi bagaimana dengan efeknya adanya program ini dengan tidak sama saja kehidupan masyarakat atau kami tetap saja seperti kemarin lagi pula pembagian program ini tidak merata tidak semua masyarakat ikut terlibat”

Kehidupan masyarakat yang tidak ada perkembangan tercermin dari penyampaian pak Ediriman. Penyampaian beliau memaparkan adanya tidakan yang kurang konsisten dari pihak implementer. Dimana masih ada sikap diskriminasi yang membuat masyarakat yang satu terabaikan. Kurang Konsistensi dari PNPM-MP menyebabkan realisasi program tersebut tidak terlaksana dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ati Laowo., Wawancara dilaksanakan pada hari Rabu 23 April 2014. Sebagai masyarakat Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan. Beliau menyampaikan bahwa:

“Pengaruhnya kepada kami masyarakat menurut saya tidak ada dimana pembangunan yang di bangun bukanlah kebutuhan yang mendasar bagi kami masyarakat miskin ini, pembangunan nya pun tidak semua merata ya hanyalah Desa-Desa tertentu saja”.

Penanggulangan kemiskinan melalui PNPM-MP belum terealisasi dengan baik dari ketegangan informan tersebut pihak implementer merasa sudah terlaksana dengan baik tapi pada akhirnya masyarakat yang merasakan, menikmati kebijakan tersebut. Perbedaan pendapat tersebut menceritakan kurangnya evaluasi dari pihak implementer yang membuat kehidupan masyarakat yang tidak berkembang.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah



perdesaan, PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998 .

Dalam P NPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di Desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri, Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.

Dasar hukum pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, dimana kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV yang didalamnya memuat Pasal 33 Tentang Sistem Perekonomian dan Pasal 34 Tentang Kepedulian Negara Terhadap Masyarakat Miskin. Landasan Adil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Upaya penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan berdampak positif bagi masyarakat seperti yang disampaikan Bapak Hayudin Zamili, SPd., beliau menyampaikan bahwa:

“Berefek Positif terutama di pembangunan di Tahun 2013 seperti MCK (Mandi Cuci Kakus) dan Pengadaan Air yang tidak ada di Desa menjadi ada dan membantu masyarakat menjadi tukang, dan pengadaan Material”

PNPM-MP terealisasi di kecamatan pulau-pulau batu, dengan program pemberdayaan masyarakat lewat Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Kursus Menjahit, dan Menganyam tikar. Realisasi program tersebut dilaksanakan berdasarkan ranking seperti yang diampaikan Bapak Dedy Daya sebagai ketua PNPM-MP di Kecamatan Pulau-Pulau Batu. Dari pemaparannya, beliau menyampaikan:

“Untuk menertipkan pelaksanaan ini, pengurus PNPM-MP telah merancang mekanisme sesuai dengan kaidah yang berlaku. Terlaksananya program ini kami laksanakan berdasarkan ranking dari proposal yang diajukan setiap desa”.

Mekanisme yang dilaksanakan, akan memilih ranking tertinggi dari setiap presentasi proposal yang disampaikan oleh masyarakat Desa. Setiap program tidak semua desa dikenakan, hal ini ditekankan untuk menyesuaikan program dilingkungan masyarakat. PNPM-MP dalam penanggulangan kemiskinan di kecamatan pulau-pulau batu, membantu masyarakat untuk menghindari lingkaran setan kemiskinan. Dengan adanya

program waktu demi waktu akan memberikan perkembangan yang sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat.

Tabel 1.

PNPM-MP di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan

NO	PNPM-MP	DESA	KETERANGAN
1	Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	1. Baruyu Lasara 2. Onaya	Aktif Aktif
2	Kursus Menjahit	3. Hili Amodula 4. Bawo Omasio 5. Bawo Amahelato 6. Onaya 7. Sidua Ewali	Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif
3	Menganyam Tikar	8. Lobo	Aktif

Sumber : Data Kecamatan Pulau-Pulau Batu 2014

Transformasi Kehidupan Masyarakat melalui PNPM-MP dalam Penanggulangan Kemiskinan

Perubahan kehidupan masyarakat dari keterpurukan lingkaran setan kemiskinan merupakan cita bangsa dalam mensejahterakan rakyatnya. Jika dilihat dari konsepnya, kemiskinan memiliki sifat plural sehingga kemiskinan menunjukkan adanya sekelompok orang yang serba kekurangan. Masyarakat subsisten yang tidak berpenghasilan atau berpenghasilan tapi rendah, bisa jadi tidak merasa miskin karena mereka merasa sudah terpenuhi kebutuhannya. Sebaliknya penduduk urban yang berpenghasilan sedang, mungkin merasa selalu kekurangan karena gaya hidup hedonis yang mereka jalani, atau lingkungan budaya tidak sehat yang mereka hadapi (misalnya seperti perangkap narkoba ataupun judi). Dalam hal ini meski kelihatannya mereka berkecukupan, namun apabila selalu merasa kekurangan, mereka bisa dikatakan miskin (Sulistiyanti, 2009:32).

Dalam mengukur tingkat kemiskinan BKKBN menggunakan satu rumah tangga. Kemiskinan berada pada keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I) yang ditandai oleh kesulitan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan non ekonomi. Di samping merujuk kepada individu dan rumah tangga penduduk miskin, ukuran kemiskinan juga dengan pendekatan melalui pengamatan daerah miskin. Terdapat hubungan yang kuat antara wilayah miskin dengan penduduk miskin, sehingga dengan mengetahui wilayah miskin dapat diharapkan ditemui mayoritas penduduk miskin. Bappenas (2004:23), dalam Diah, 2007 mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Kehidupan masyarakat Kecamatan Pulau-Pulau Batu, lebih mendominasi profesi sebagai petani, buruh dan nelayan. Perkembangan kehidupan masyarakat sampai saat memang tidak berubah secara drastis dari penelitian yang dilakukan masyarakat di kecamatan ini, masih mengharapkan penghasilan dari kepala keluarga dilain sisi buah dari pada kreatifitas akan menjadikan sebagai tabungan untuk melepaskan diri dari lingkaran setan



kemiskinan. Produktifitas lambat laun akan terus berkembang selama pihak PNPM-MP masih mengontrol pekerjaan tangan/kreatifitas yang masyarakat kerjakan.

Perubahan yang terjadi ditandai dengan adanya :

- 1) Pengetahuan. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat pada umumnya merupakan sesuatu pengetahuan baru, yang selama ini belum diketahui oleh masyarakat itu sendiri.
- 2) Produktifitas. Produktifitas masyarakat Kecamatan Pulau-Pulau Batu bertitik tolak pada pengetahuan yang diperoleh dan dikembangkan menjadi sebuah produk baru seperti mengayam tikar dan kursus menjahit.
- 3) Tabungan. Hasil produkiitas yan diperoleh akan ditabung sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dalam hal ini berupa Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Dari hasil tersebut, menunjukkan tingkat keberhasilan dari PNPM-MP yang menunjang kehidupan masyarakat daan melepaskan mereka dari lingkaran setan kemiskinan. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Linda Ziura. Beliau menegaskan bahwa:

“Masyarakat akan bersyukur sekali dengan adanya program PNPM-MP, dengan adanya program ini akan membangkitkan semangat masyarakat untuk terus lebih menciptakan produktifitas walaupun hal ini tidak secara drastis, paling tidak setiap masyarakat sudah mempunyai satu pegangan untuk hidup sekarang dan massa depan”.

Kesejahteraan masyarakat akan terlihat dari perubahan kehidupan masyarakat dari kehidupan yang sebelumnya menuju kehidupan yang lebih baik. Hal ini terlihat dari kehidupan masyarakat Kecamatan Pulau-Pulau Batu saat ini. Proses perubahan yang melingkupi kehidupan masyarakat Kecamatan Pulau-Pulau Batu telah menunjukkan keberhasilan dari program PNPM-MP tersebut sebagai program penanggulangan kemiskinan lewat pemberdayaan masyarakat.

Pembahasan

Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan dalam kerangka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan sesuai teori yang digunakan peneliti sebelumnya yaitu teorinya tentang lingkaran setan kemiskinan yaitu adanya keterbelakangan, ketidak-sempurnaan pasar, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas.

Lingkaran setan kemiskinan dalam kehidupan masyarakat kecamatan Pulau-Pulau Batu telah merambat sangat pesat. Pernyataan dari ketiga informan di atas, masing-masing menggambarkan kurangnya pendapatan masyarakat yang mengakibatkan kurangnya produktifitas. Semua ini dikarenakan ketertinggalan, keterbelakangan, kekurangan modal, sehingga pendapatan masyarakat setiap harinya tidak dapat ditabung dan hal ini menyebabkan kurangnya produktifitas atau kreativitas masyarakat yang bernilai ekonomi mandiri.

Penyebab kemiskinan di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias adalah : Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kemudian diikuti oleh



akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah dan terakhir kemiskinan muncul disebabkan perbedaan akses dan modal.

Pemerintah merupakan implementer dari pada kebijakan. Setiap kebijakan yang ditetapkan harus memikirkan dampak yang akan terealisasi kepada masyarakat. Dalam hal ini dampak yang akan terjadi berupa dampak langsung, dampak jangka menengah dan dampak jangka panjang yang akhirnya akan mengarah kepada akhir daripada kinerja implementasi.

Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan telah merealisasikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan. Hal ini merupakan pusat pengembangan kreatifitas masyarakat menuju ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif dapat mengembangkan taraf kehidupan masyarakat dan menjauhkan masyarakat tersebut dari lingkaran setan kemiskinan. PNPM-MP terealisasi di Kecamatan Pulau-Pulau Batu, dengan program pemberdayaan masyarakat lewat Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Kursus Menjahit, dan Menganyam tikar.

Perubahan kehidupan masyarakat dari keterpurukan lingkaran setan kemiskinan merupakan cita bangsa dalam mensejahterakan rakyatnya. Jika dilihat dari konsepnya, kemiskinan memiliki sifat plural sehingga kemiskinan menunjukkan adanya sekelompok orang yang serba kekurangan. Masyarakat subsisten yang tidak berpenghasilan atau berpenghasilan tapi rendah, bisa jadi tidak merasamiskin karena mereka merasa sudah terpenuhi kebutuhannya. Sebaliknya penduduk urban yang berpenghasilan sedang, mungkin merasa selalu kekurangan karena gaya hidup hedonis yang mereka jalani, atau lingkungan budaya tidaksehat yang mereka hadapi (misalnya seperti perangkap narkoba ataupun judi). Dalam hal ini meski kelihatannya mereka berkecukupan, namun apabila selalumerasa kekurangan, mereka bisa dikatakan miskin.

Kehidupan masyarakat Kecamatan Pulau-Pulau Batu, yang lebih mendominasi profesi sebagai petani, buruh dan nelayan sekarang telah memiliki pekerjaan sampingan lewat program PNPM-MP. Perkembangan kehidupan masyarakat sampai saat memang tidak berubah secara drastis dari penelitian yang dilakukan masyarakat di kecamatan ini, masih mengharapkan penghasilan dari kepala keluarga dilain sisi buah dari pada kreatifitas akan menjadikan sebagai tabungan untuk melepaskan diri dari lingkaran setan kemiskinan. Produktifitas lambat laun akan terus berkembang selama pihak PNPM-MP masih mengontrol pekerjaan tangan/kreatifitas yang masyarakat kerjakan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di Bab IV maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Implementasi program penanggulangan kemiskinan dalam kerangka realisasi program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan dalam memberikan realisasi terhadap masyarakat di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan masih belum terlaksana dengan baik sehingga banyak masyarakat tidak semua mengetahui tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan fungsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat itu sendiri.



- 2) Faktor yang menjadi Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Kerangka Realisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan. Yang menjadi faktor pendukung dalam PNPM-MP adalah dengan adanya kegiatan dari program PNPM-MP yaitu MCK (Mandi Cuci Kalkus), SPP (Simpan Pinjam Perempuan), Kursus Menjahit dan Menganyam Tikar sehingga kehidupan masyarakat menuju ekonomi kreatif dan menjauhkan masyarakat tersebut dari lingkaran setan kemiskinan. Sedangkan yang menjadi penghambat implementasi program penanggulangan kemiskinan dalam kerangka realisasi PNPM-MP adalah dalam bentuk program penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang dilakukan oleh PNPM-MP dalam bentuk rapat/musyawarah maupun kaderisasi juga masih belum terlaksana secara optimal walaupun sebagian dalam bentuk rapat/musyawarah dilaksanakan, akan tetapi dalam merekrut untuk menjadi kaderisasi dari PNPM-MP tersebut belum optimal dilaksanakan oleh PNPM-MP dan tingkat partisipasi masyarakat dalam program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan tidak ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2007. *Perihal Ilmu Politik Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Edi, Suharto. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik-Peran pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial dalam mewujudkan Negara kesejahteraan (welfare) di Indonesia*, Cet.1, (Bandung: Alfabeta)
- Edi, Suharto. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan social dan Pekerjaan Sosial*, Cet .3, (Bandung: PT Rafika Aditama)
- Luhfi, Syamsul. Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, Undang- Undang Dasar 1945 (Amandemen Ke IV). Deklarai dan Rekomendasi serta Temu NasionalPNPM Mandiri – Jakarta. 2008
- Meleong, lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif* cet 16. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Islamy, Irfan. 1997. *Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bina Aksara.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta
- Sugioyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta
- Sugioyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Banfung. Alfabeta
- Satori, Djam'an. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Rafika Aditama.
- Wahab, Solichin Abdul. 2006. *Pengantar Analisis Sistem*. Jakarta. Rineka Cipta.

Sumber Website:

- Http : www.PNPM Mandiri Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, di akses pada tanggal 23 April 2011.
- <http://dedyjenggikutara.blogspot.com/2011/12/dedy-skripsi-dari-bab-i-sampai-bab-v.html>.



epository.usu.ac.id/bitstream/.../3/Chapter%20II.pdf. Pada tanggal 2 April 2014, pukul 11:00 Wib.
www.library.upnvj.ac.id/pdf/s1fisip08/.../bab3.pdf. Pada tanggal 9 April 2014, Pukul 07:Wib.
ejournal.unesa.ac.id/article/1968/42/article.pdf. Pada tanggal 12 April 2014, Pukul 02:01 Wib
elib.unikom.ac.id/download.php?id=112335. Pada tanggal 18 April 2014, Wib 15:00 Wib.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, Kep Kesra No 25 / Kep / Menkro / Kesra / VII / 2007.

Pedoman Umum PNPM-Mandiri 2007/2008.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Ichsan, R. N., & SE, M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.

ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman. SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 127-132, feb. 2021. ISSN 2745-6072

NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 107-112

REZA NURUL ICHSAN; LUKMAN NASUTION; SARMAN SINAGA; DHONI MARWAN. "The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 258-264. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.032

ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.

Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2)



- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20.
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf
- Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27.
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf